

Peran Indonesia dalam OGP Steering Committee



Gambar 1. OGP SC Working-Level Meeting

Steering Committee OGP merupakan badan eksekutif OGP yang bertugas untuk mengembangkan, mempromosikan, dan menjaga nilai dan prinsip OGP. Selain itu, OGP bertugas untuk menyusun program dan kebijakan OGP, serta memastikan fungsi kelembagaan OGP berjalan. *Steering Committee* OGP (SC OGP) beranggotakan 11 (sebelas) negara dan 11 (sebelas) *Civil Society Organizations* (CSO). SC OGP terdiri dari tiga subkomite, yaitu *Governance and Leadership* (GL), *Criteria and Standards* (C&S), dan *Thematic Leadership* (TLS). Subkomite TLS memberikan arahan strategis untuk meningkatkan reformasi keterbukaan pemerintah di berbagai tema prioritas. Indonesia merupakan salah satu negara anggota *Steering Committee* OGP periode 2019-2022. Indonesia bersama dengan Zuzana Wienk dari White Crow (CSO) adalah *co-chair* subkomite TLS.

Pada bulan Februari 2020 lalu, SC OGP mengadakan pertemuan di Berlin dalam rangka *Annual Working-Level Meeting*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pertemuan ini, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas dan *Minister Counselor of Political Affairs* Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin juga turut hadir. Pertemuan ini membahas beberapa isu penting dalam OGP, yang di antaranya adalah penyusunan rencana dan evaluasi OGP dalam tiga tahun ke depan, perubahan mekanisme *Independent Research Mechanism* (IRM), tata kelola keanggotaan OGP, dan tema-tema prioritas OGP. Beberapa sesi dalam pertemuan tersebut terangkum sebagai berikut.



Gambar 2. Susunan Anggota Steering Committee Open Government Partnership

Dalam pertemuan ini, SC OGP mendiskusikan kondisi dan capaian OGP secara umum. Setidaknya hingga tahun 2019, tercatat lebih dari 70 negara menjadi anggota OGP. Sebanyak lebih dari 4.000 komitmen dalam 250 rencana aksi sudah dibuat oleh negara anggota OGP. Laporan IRM juga menyebutkan bahwa 66 persen komitmen terselesaikan dan 20 persen memberikan dampak signifikan bagi agenda reformasi keterbukaan pemerintah. Berlandaskan fakta tersebut, SC OGP kemudian menyusun rencana tiga tahunan untuk meningkatkan peran OGP dalam mendorong keterbukaan pemerintah yang disebut OGP *Three Year Plan* (3YP). Dokumen lengkap tersebut dapat diunduh melalui website OGP <https://www.opengovpartnership.org>.

SC OGP juga membahas resolusi bersama terkait dengan keputusan menonaktifkan keanggotaan Pakistan dan Jamaika di OGP. Kedua negara tersebut dianggap telah melanggar peraturan OGP dengan tidak menyusun dan menyampaikan rencana aksi keterbukaan pemerintah selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, SC OGP juga mengesahkan IRM Refresh, yaitu dokumen yang memuat mekanisme terbaru dari IRM. Perubahan mekanisme IRM ini didasarkan atas evaluasi dan masukan dari negara dan CSO anggota OGP selama tahun 2019.

SC OGP juga menyusun rekomendasi berdasarkan masukan anggota dan tim ahli untuk mendorong keterbukaan pemerintah dalam tema *digital governance* dan *civic space*. Kedua tema tersebut merupakan bagian dari tema prioritas yang akan diangkat oleh OGP dalam tiga tahun ke depan. SC OGP juga menyusun sebuah strategi untuk mendorong keterbukaan dalam lingkup pemerintah yang lebih kecil. Strategi ini disebut dengan OGP *Local* yang memuat arahan dan rekomendasi untuk melibatkan pemerintah daerah dalam menerapkan nilai dan prinsip keterbukaan pemerintah.

Beberapa tema diskusi lainnya yang tidak kalah penting adalah menguatkan sektor pengetahuan dan penelitian mengenai keterbukaan pemerintah. Hal ini penting sebagai dasar bagi setiap anggota dalam mendorong agenda reformasi keterbukaan pemerintah di masing-masing negara. OGP SC *Working-Level Meeting* ditutup dengan pengesahan strategi OGP 3YP dan anggaran OGP. Informasi lebih lengkap mengenai OGP SC *Working-Level Meeting* dapat dilihat di laman website <https://www.opengovpartnership.org/about/who-we-are/steering-committee/meetings-minutes-and-communications/>.